

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pola pikir pemerintah sudah mengacu pada tata pemerintahan yang baik, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam era otonomi saat ini pembangunan kesejahteraan sosial di bidang anak masih menjadi masalah, disatu sisi pembangunan fisik guna peningkatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas dibandingkan dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, disisi lain akibat terjadinya arus reformasi permasalahan sosial semakin meningkat dan minim dari segi pelayanan fisik serta perbaikan sarana prasarana pelayanan sosial yang terbatas. Kondisi tersebut menjadikan prioritas pelayanan bidang kesejahteraan sosial sangat minim dari segi fisik, pemeliharaan, anggaran maupun sumber daya manusianya.

Anak adalah generasi penerus dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Masa depan bangsa bergantung pada kualitas anak-anak Indonesia yang tumbuh kembang di dalam reformasi membangun tata kehidupan yang demokratis. Dengan hal ini pemerintah berupaya menjamin hak-hak anak agar dapat mengembangkan potensi-potensinya. Pemerintah juga harus memperhatikan masalah anak sebagai masalah yang serius karena anak merupakan aset bangsa yang sangat penting.

Keluarga terkadang lupa akan kewajiban serta tanggung jawab terhadap anaknya sehingga mereka berbuat hal yang tidak semestinya, misalnya melakukan kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan lain-lain. Oleh karena itu perlindungan dan pelaksanaan kesejahteraan hak-hak anak juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Undang Undang Dasar 1945 melalui Pembukaan Alinea Keempat mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Dari amanat tersebut pemerintah harus protek terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan rakyatnya. Dengan ini anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja tetapi juga bangsa dan negara.

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

Peran guru dan orangtua sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak mengenai bagaimana cara mendidik anak. Perlakuan salah terhadap anak dapat memberikan umpan balik yang negatif bagi anak. Akibatnya anak menjadi bermasalah sehingga terkucilkan dari masyarakat. Anak bermasalah adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menenurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.² Anak-anak yang mengalami masalah sosial perlu mendapatkan penanganan khusus untuk mengatasi masalah mereka sehingga dapat memotivasi anak agar memiliki kepribadian yang baik. Anak yang memerlukan penanganan khusus adalah anak yang mengalami hambatan sosial misalnya anak yang pendiam, kurang percaya diri, dan anak yang nakal.

Perlindungan terhadap anak dilakukan oleh berbagai lembaga sosial baik yang berada di bawah naungan pemerintah maupun masyarakat. Lembaga sosial tersebut bertugas untuk melakukan pelayanan bimbingan atau pembinaan. Dalam pasal 11 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Pembinaan atau bimbingan yang diberikan merupakan proses pemberian bantuan kepada anak yang bermasalah supaya dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah sangat serius memperhatikan masalah anak.

² Supeno Hadi, 2010, *Dekriminalisasi Anak*, Jakarta: CV Graha Putra, Hlm. 8.

Dalam pasal 9 Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Serta Pasal 49 pada Undang Undang yang sama menyebutkan: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya mendapatkan pendidikan.³ Dengan adanya undang undang tersebut anak yang berperilaku buruk bagaimanapun juga harus mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemerintah berupaya untuk menjamin hak-hak anak agar terlindungi dan terpelihara hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang secara wajar. Sebagai wujud konkrit usaha dan kepedulian pemerintah dalam menanggulangi masalah ini, pemerintah mendirikan lembaga sosial kesejahteraan anak yaitu Lembaga Sosial Petirahan Anak di Jawa Timur. Salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu. Petirahan sendiri adalah tempat beristirahat untuk berobat atau untuk memulihkan kesehatan. Dalam hal ini petirahan didefinisikan sebagai tempat pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan belajar.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pelayanan dan penyantunan serta rehabilitasi dan penyaluran anak usia Sekolah Dasar bermasalah. Fokus utamanya untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial anak akibat adanya hambatan sosial anak, perlakuan yang salah terhadap anak, adanya hambatan fungsi sosial anak, serta adanya hambatan tumbuh kembang anak.

³ Ketentuan Wajib Belajar 9 tahun juga termaktub di dalam UU nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembentukan UPT PPSPA Batu ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 73 tahun 2012 perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor: 119 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembentukan UPT ini berasal dari Pemerintah Dinas Provinsi Jawa Timur yang tersebar diberbagai wilayah Jawa Timur yang salah satunya yakni UPT PPSPA yang berada di Kota Batu.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak merupakan wadah atau tempat bagi anak yang mengalami hambatan fungsi sosial yang mempunyai tugas dinas dalam pelayanan tertirah bagi anak usia Sekolah Dasar yang mengalami masalah sosial psikologis serta pendampingan sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Pada pasal 1 ayat 3 UU no 11 tahun 2012 mengenai (ABH) tentang Sistim Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai nak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sedangkan Sesuai UU No. 23 Tahun 2003 mengenai (AMPK) tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menjelaskan bahwa:

“Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) adalah dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak terekploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Sesuai Pergub No. 119 Tahun 2008 UPT PPSPA Batu. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan rehabilitas sosial anak usia Sekolah Dasar yang mengalami masalah sosial psikologis, seperti:

1. Bandel, agresif, suka berkelahi
2. Pendiam, pemalu, minder
3. Manja, pemalas, kurang tanggungjawab
4. Prestasi belajar menurun, kurang konsentrasi, sulit belajar (bukan lamban belajar).

Untuk membangun sinergisitas antar bidang dan UPT, Dinas Sosial secara rutin melakukan koordinasi. Untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar bidang dan UPT, maka disusunlah tugas, fungsi pokok masing-masing bidang dan UPT. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada tugas, fungsi pokok masing-masing bidang dan UPT, tetapi juga menanamkan pemahaman dan paradigma pembangunan, bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat. Paradigma pembangunan semacam ini juga dikaitkan dengan agenda pemerintahan yang baik (*good governance*). Agenda utama yang ditempuh dalam terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan sasaran pokoknya adalah : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara.

UPT PPSPA Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kegiatan pelayanan sosial petirahan, pendampingan sosial,

pengembangan perilaku, resosialisasi dan pembinaan lanjut bagi anak usia Sekolah Dasar yang mengalami masalah sosial psikologis serta perlindungan sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) berbasis pekerjaan sosial.

Pemerintah Dinas Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPSPA Batu menjalankan program tetirah PMKS khususnya masalah hambatan fungsi sosial anak. Program tetirah bagi PMKS dimaksudkan untuk mencegah terhambatnya fungsi sosial anak yang kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Inti dari program ini terletak pada pembentukan dan pembinaan mental anak sehingga diharapkan nanti ada perubahan perilaku yang cenderung positif dari anak setelah mengikuti program ini.

Program tetirah bagi PMKS ini merupakan program yang diberikan kurang lebih selama 1 bulan dilaksanakan secara berkesinambungan dan sasarannya bagi siswa SD yang tidak memiliki keahlian pendidikan serta tergolong anak nakal, malas belajar serta tergolong bandel. Selama itu mereka diharuskan untuk menginap dan mengikuti agenda agenda yang ditentukan. Meskipun begitu, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan akademik supaya nanti kembali mereka tidak tertinggal mata pelajaran.

UPT PPSPA Batu sengaja membuat agenda sebagian besar secara kelompok karena bertujuan untuk mengasah ketrampilan sosial (*social skill*) anak-anak dan untuk melihat perilaku anak dalam penyesuannya sehingga untuk mempermudah proses penanganan. Berbagai bimbingan diberikan pada anak yang tinggal sementara di UPT PPSPA Batu, mulai dari bimbingan pemecahan masalah hingga bimbingan akademik. Bimbingan pemecahan masalah dapat berupa observasi,

wawancara, studi angket, tes IQ dan kepribadian, temu bahas kasus, psychogame, konseling, treatment sosial, evaluasi dan rujukan. Bimbingan fisik dilakukan melalui kegiatan olah raga, bimbingan pola hidup sehat, bina diri dan lingkungan, outbound dan kerumahtanggaan.

Namun dalam Permasalahannya masih banyak orang yang awam atau belum mengetahui dengan kegiatan serta tujuan UPT PPSPA tersebut. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa anak-anak yang tinggal sementara di UPT PPSPA adalah anak-anak yang nakal sehingga mereka memandang sebelah mata anak-anak yang tinggal sementara di tempat tersebut. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah banyaknya sekolah maupun orang tua yang gengsi jika anak mereka tinggal sementara di panti sosial tersebut. Bahkan, fenomena yang berkembang adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak mendapat pendampingan yang tepat melainkan justru dikeluarkan dari sekolah. Secara psikologis, hal ini tentu akan berdampak negatif bagi perkembangan anak. Anak-anak yang seperti ini seharusnya mendapatkan binaan, bukan malah dijauhi. Peran UPT PPSPA Batu disini adalah tempat yang cocok bagi anak yang mengalami hambatan fungsi sosial karena anak seperti itu bukanya dikucilkan, melainkan diberikan kasih sayang dan perhatian.

Pemerintah berupaya dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Peran Pemerintah harus ada bentuk pengawasan dan tindak lanjutnya. Apakah mampu mengatasi permasalahan yang ada atau tidak. Dinas Pendidikan seharusnya menindaklanjuti kebijakan dan setiap tugas dan fungsi guru yang diterapkan, tidak hanya sebatas menerapkan. Setiap guru maupun tenaga ahli khusus dalam mendidik anak dalam mengidentifikasi permasalahan

harusah ada disetiap sekolah apakah mampu, Sehingga penerapannya tidak hanya sebatas sampai di lembaga saja, namun juga elemen masyarakat.

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak berfungsi sebagai pelayan alternatif yang menggantikan fungsi keluarga yang kehilangan perannya. Jadi, gangguan saat disekolahnya dulu maupun dilingkungan keluarga dapat diatasi semaksimal mungkin melalui indentifikasi tenaga kerja asesmen dibidangnya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Tugas dari UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak PPSPA Bima Sakti Batu sebagai lembaga yang menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak-anak yang bermasalah sehingga anak dapat mengembangkan kepribadiannya menjadi anak yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab dan berbudi luhur.

Anak-anak dibimbing dan dibina oleh tenaga kerja khusus asesmen dalam membentuk pribadiannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di UPT PPSPA Bima Sakti. Banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan anak-anak agar dapat memotivasi mereka untuk maju kedepan. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, serta bimbingan lanjut bagi anak yang mengalami masalah perilaku dan hambatan penyesuaian diri. Anak-anak dilatih untuk dapat hidup khusus diberikan agar anak dapat memulihkan dan mengembangkan dirinya sehingga membentuk kepribadian yang baik dan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak diharapkan mempunyai sikap dan tindakan yang baik dan benar dalam interaksi di masyarakat dan lingkungannya sehingga anak dapat menjadi warga negara mandiri, disiplin dan percaya diri.

Masalah tingkah laku anak bisa berasal dari kejadian-kejadian di luar kontrol keluarga mereka dan penyebabnya adalah masalah tingkah laku yang dipengaruhi mental anak. Oleh karena itu anak-anak itu perlu mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pertolongan. Mereka harus dibesarkan dengan rasa perdamaian, persaudaraan, toleransi serta dengan penuh kesadaran mengabdikan tenaga dan bakatnya kepada sesama manusia. Segala kebutuhan baik itu bimbingan, pendidikan, dan keterampilan diberikan kepada anak agar anak dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Penanganan Penanganan khusus diberikan agar anak dapat memulihkan dan mengembangkan dirinya sehingga membentuk kepribadian yang baik dan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak diharapkan mempunyai sikap dan tindakan yang baik dan benar dalam interaksi di masyarakat dan lingkungannya sehingga anak dapat menjadi warga negara yang baik bagi bangsa dan negara. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu Dalam Membentuk Kepribadian Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik dalam rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu dalam pembentukan kepribadian anak?
2. Apa saja hambatan-hambatan bagi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu

dalam pembentukan kepribadian anak dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak PPSPA (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu dalam pembentukan kepribadian anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu dalam pembentukan kepribadian anak dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan daripada penelitian ini dilaksanakan, maka peneliti akan bersungguh sungguh dalam membuat laporan penelitian dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Diantara manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memperkaya pengetahuan sosial perihal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk informasi yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi pembaca khususnya di bidang sosial dan politik mengenai Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu dalam pembentukan kepribadian anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan dan pengurus UPT PPSPA Bima Sakti sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan program pelayanan petirahan anak-anak yang bermasalah di masa yang akan datang. Selain itu dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penanganan anak-anak yang bermasalah, karena anak adalah generasi penerus bangsa, maka perlu menciptakan kepribadian dan moral yang baik.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membimbing dan memberikan perhatian yang lebih kepada anak dan mengontrolnya dalam segala aktivitasnya, jika masyarakat didalam lingkungan anak menemui situasi tersebut dan tidak bisa menangani masalah yang dihadapi dapat direhabilitasi serta menempuh Sekolah Dasar yang semestinya seperti anak-anak lain memelaui UPT PPSPA Bima Sakti Batu.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan dengan dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁴ Berdasarkan judul dalam penelitian ini, yakni **“Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial**

⁴ Sangarimbun Mastri & Efendi Sofian, 1982, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 34.

Petirahan Anak UPT PPSPA Bima Sakti Batu dalam membentuk kepribadian anak” maka dapat diturunkan dalam tiga konsep pembahasan,yakni:

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.⁵ Di kehidupan sosial nyata, peran berarti menduduki suatu posisi sosial di dalam masyarakat. Dalam hal ini seseorang individu juga harus patuh pada skenario yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah.⁶ fungsi dari suatu hal. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran UPT PSPA Bimasakti Batu sebagai pelayan alternatif yang menggantikan fungsi keluarga yang kehilangan perannya. Jadi, gangguan keluarga tersebut dapat diatasi dengan menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi anak-anak dengan bimbingan sosial, mental spiritual, keterampilan dan bimbingan belajar.

2. Pembentukan Kepribadian Anak

Dalam penelitian ini yang dimaksud kepribadian adalah suatu karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di UPT PPSPA Batu. Sifat-sifat yang dimiliki anak-anak dapat dilihat melalui tingkah laku atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang ditampung di PSPA Bimasakti Batu adalah anak-anak yang mengalami masalah sosial mengenai kepribadian anak.

⁵ Soekanto Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 212.

⁶ Suhardono Edy, 1994, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.7.

Anak-anak tersebut perlu mendapatkan pelayanan bimbingan agar dapat mengentaskan masalah perilaku anak dan hambatan peyesuaian diri.

Pembentukan merupakan proses, membentuk perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau sesuatu menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, Pembentukan kepribadian anak adalah membentuk anak agar mempunyai akhlak dan moral yang baik demi mewujudkan kepribadian yang sehat/positif. Untuk membentuk kepribadian yang baik, anak harus banyak praktek langsung dengan melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari sehingga anak bisa memahami pembelajarannya. Anak perlu diberi kebebasan dalam melakukan tugasnya walaupun masih dalam pengawasan.

3. Panti Sosial Petirahan Anak

Panti Sosial Petirahan Anak merupakan tempat rehabilitasi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang mengalami masalah sosial. Melalui lembaga kesejahteraan sosial ini, anak-anak ditampung untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan moral. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) mempunyai beberapa layanan yang sifatnya preventif dan rehabilitatif dalam menangani masalah anak. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan sosial kegiatan, mental spiritual, keterampilan yang di dalamnya memuat konsep moral. Peran yang dilaksanakan oleh PSPA diharapkan dapat mengentaskan masalah perilaku anak dan hambatan penyesuaian diri anak sehingga dapat menambah percaya diri anak untuk maju.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberi petunjuk bagaimana caranya mengukur variabel.⁷ Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditentukan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran UPT PPSPA Bima Sakti Batu dalam Membentuk Kepribadian Anak
 - a. Pelaksanaan prosedur dan mekanisme program rehabilitasi anak usia sekolah dasar bermasalah.
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Program UPT PPSPA Batu
2. Faktor Pendukung dan Pengambat dalam Upaya Program tetirah PMKS di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian.⁸ Maka akan digunakan uraian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah guna menggambarkan fenomena sosial.⁹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dimana dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang keadaan sosial

⁷ Sabgaribuan Masri & Effendi Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta hlm. 46.

⁸ Zuriah, Nurul, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan:Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 227.

⁹ Suryabata, Sumadi,1983, *Metode Penelitian*, Jakarta CV Rajawali, Hlm. 19.

disekitar tentang peran, hambatan dan sarana pendukung bagi UPT PPSPA dalam upaya membentuk kepribadian anak Sekolah Dasar yang bersalah.

Berdasarkan sifat penelitian deskriptif dan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar maupun lainnya yang tidak bersangkutan dengan angka-angka. Data tersebut berasal dari hasil berupa wawancara, catatan di lapangan, dokumentasi, rekaman percakapan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga hasil dari penelitian yang dilaksanakan terkait dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai penggambaran kegiatan apa saja yang dilakukan dan tugas dan fungsi apa saja dari Dinas Sosial PPSPA dalam membina serta membentuk kepribadian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam pengumpulan data, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika suatu peristiwa terjadi.¹⁰ Dengan kata lain, data primer di dapatkan peneliti pada saat turun lapangan. Sebagaimana data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan perihal bagaimana peran UPT PPSPA Bima Sakti dalam membentuk kepribadian anak yang bermasalah.

¹⁰ Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hlm 119.

b. Sumber Data Sekunder

Definisi data data sekunder menurut Suwarno adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.¹¹ Data sekunder peneliti yang diperoleh dari UPT PPSPA Bima Sakti meliputi dokumen resmi instansi (profil dan data kegiatan instansi), salinan peraturan perundang-undangan, maupun berupa surat edaran yang diperoleh melalui dokumentasi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra¹². Pengamatan dapat bervariasi mulai dari hal yang sangat terstruktur hingga yang memiliki pola-pola yang tidak beraturan mengenai kejadian dan tingkah laku tertentu. Melalui observasi peneliti diharapkan dapat lebih memahami situasi dan kondisi lapangan agar lebih mudah dalam pelaksanaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melakukan tanya jawab, yang kemudian hasil wawancara tersebut dapat

¹¹ Suwarno, Jonathan, 2007 *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi Offset. Hlm. 123.

¹² Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 87.

dikonstruksikan menjadi topik tertentu¹³. Adapun narasumber dalam wawancara yang dimaksud dalam subjek penelitian yang telah disebutkan dalam sub-sub sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti guna melengkapi dan memperkuat data dari hasil observasi maupun wawancara. Adapun dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari UPT PPSPA Bima Sakti Batu seperti data, foto-foto pendukung, catatan lapangan peneliti.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang akan diminta keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* yang berdasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti¹⁵. Berdasarkan Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah Batu Drs, Didik Haryanto sebagai Wakil Kepala UPT PPSPA, Bapak Budiharjo, S.Pd,

¹³ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, Bandung, Alfabeta, hlm. 15.

¹⁴ Arikunto, Suharsimi 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Raneke Cipta, Jakarta, hlm. 236.

¹⁵ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.96.

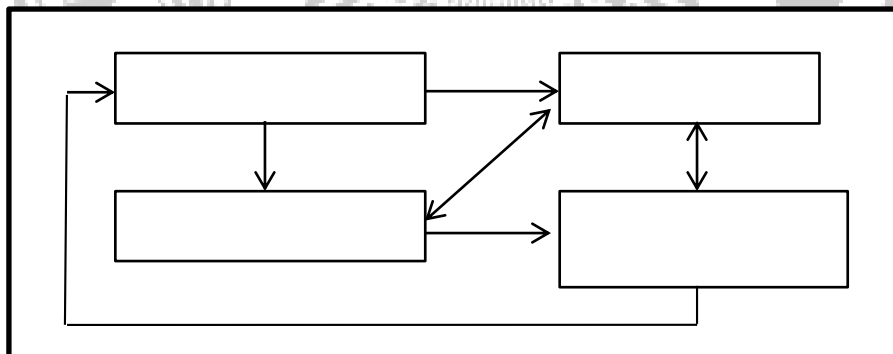
M.Si, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Dra. Endang Kastutik sebagai Pekerja Sosial Madya dan anak-anak yang bermasalah di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Bima Sakti Batu.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bima Sakti Kota Batu yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 93 Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berperan dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak yang bermasalah.

I. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Bagan1. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman, 1992

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan Pengumpulan data pada peneltian ini adalah dengan menggunakan

wawancara dan dokumentasi.¹⁶ Proses pengumpulan data dilakukan saat pra penelitian dan penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan laporan data lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data diperlukan oleh peneliti. Sebagaimana yang peneliti sampaikan di sub-sub sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses penelitian, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.¹⁷ Langkah-langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti mengumpulkan data serta mencari data yang tidak diperlukan. Semakin peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data diperlukan sehingga data tidak bertumpuk supaya tidak mempersulit analisis selanjutnya.

¹⁶ Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 70.

¹⁷ *Ibid* hlm. 16.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan¹⁸. Penyajian data diarahkan supaya data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga dapat mudah dipahami, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah peneliti.

Penyajian data baik yang baik merupakan satu langkah paling menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif. Akan tetapi disertai proses analisis yang tentu menerus sampai proses penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

4. Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari peneliti. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti ketentuan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan

¹⁸ *Ibid* hlm 17.

pendapat Miles dan Huberman, proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah dilakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil peneliti yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

